




# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

 (0293) 366049

 SATPOLPP.MAGELANGKOTA.GO.ID

SATPOL PP KOTA MAGELANG JL.LETJEND SUPRAPTO  
NO.2 KOTA MAGELANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja . Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini

diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang .

Magelang, Desember 2025  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAGELANG

**OT ROSTRIANTO. S. IP., M.M**

Pembina TK.I  
19690523 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I     PENDAHULUAN .....	BAB I   -   1
1.1. Latar Belakang .....	BAB I   -   1
1.2. Landasan Hukum .....	BAB I   -   4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	BAB I   -   7
1.4  Sistematika Penulisan .....	BAB I   -   8
 BAB II     HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG TAHUN 2023 .....	 BAB II   -   10
2.1  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.....	BAB II   -   10
2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	BAB II   -   47
2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	BAB II   -   51
2.4  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	BAB II   -   52
2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	BAB II   -   65
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	BAB III  -   68
3.1  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	BAB III  -   68
3.2  Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	BAB III  -   69
3.3  Program dan Kegiatan.....	BAB III  -   73
 BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 BAB IV   -   90
 BAB V     PENUTUP.....	 BAB V   -  103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Untuk mendukung tercapainya perencanaan yang berkualitas maka dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah tidak bisa lepas dari perencanaan Pembangunan Nasional. Sebab perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan lima tahunan keempat dari RPJP Kota Magelang Tahun 2024 – 2025 dan masuk dalam Tahun pertama dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Perubahan Kota Magelang Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025, dan penambahan adanya anggaran Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Kecamatan Kelurahan Kota Magelang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (RODANYA MASBAGYO). Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD Perubahan telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan RKPD Perubahan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah ada pengesahan dari walikota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- d. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah / Walikota yang juga disinergikan dengan Renja Satpol PP Propinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan atas evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester I, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang perlu menyusun Perubahan Renja OPD Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja OPD Tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Per  
aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);



11. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

## Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan tahunan disusun dengan maksud sebagai :

- a. Pedoman penyusunan KUA – PPAS
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah ( RKA- OPD )
- c. Pedoman pencapaian target-target kinerja Kepala Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat di Tahun 2025
- d. Dasar penilaian akuntabilitas kinerja tahunan

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA – OPD) setiap tahun, agar kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tidak menyimpang dari Renstra OPD maupun RPJMD 2021 – 2026 dan RKPDP Kota Magelang Tahun 2025. Adapun tujuan Perubahan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 adalah :

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 2021 – 2026 , Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dan Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
- b. Untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 meliputi :

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG TAHUN 2024

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- C. Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2025, seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan tanpa menemui hambatan.

Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Dari hasil evaluasi yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, sub Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota, sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan legal.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan layanan dalam rangka Penegakan Perda disebabkan tidak ada layanan Penegakan Perda yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota, sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan legal tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing yang mengharuskan setiap OPD untuk memotong anggaran yang ada, sedangkan untuk sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana tidak mencapai target dikarenakan belum adanya regulasi isi ulang apar untuk dibagikan kepada masyarakat.

Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
  - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
  - Penindakan Atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
  - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- a. Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- c. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal

Beberapa program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 3.1.1.1. Masing – masing bidang melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang sudah di tentukan
- 3.1.1.2. Ketersediaan anggaran untuk penunjang kegiatan

Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Dari hasil evaluasi tidak ada yang melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan.

Program dan kegiaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang diatas capaiannya tidak ada yang melebihi target dipengaruhi oleh faktor yaitu Rencana kegiatan penganggaran telah sesuai dengan yang rencanakan.

**Tabel 2. 1**  
**Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Berdasarkan kegiatan monev yang dilaksanakan tanggal 2-24 September ditemui kondisi riil di lapangan bahwa apar tidak dalam kondisi ready sesuai yang telah direkomendasikan. Apar masih dalam dus di Gudang. Hal ini menggambarkan pengadaan barang tidak ada asas manfaatnya			Sudah melakukan monev apar dan koordinasi kepada OPD terkait dan izin tidak melaksanakan kegiatan tersebut dengan nota dinas



No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
2.	Belum ada perwal pendukung Perda dan data Pelanggaran			Mendorong pengampu Perda untuk melengkapi Perwal dan data pelanggaran Reklame. Selain itu mendorong penerbitan rekomendasi pembongkaran reklame, mengkoordinasikan dengan penyelenggara untuk pembongkaran mandiri serta pendampingan proses pembongkaran oleh penyelenggara.
3.		<input type="checkbox"/> Masing – masing bidang melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang sudah di tentukan <input type="checkbox"/> Ketersediaan anggaran untuk penunjang kegiatan		

Sumber: Data hasil olahan Tim Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut :

**TABEL 2.2**  
**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S/D TAHUN 2025\*)**  
**KOTA MAGELANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
0	0			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>									
0	0	2		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah</b>									
0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	2 Dokumen	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	24 Dokumen	24 laporan	24 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	16%
05	01	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	41 Orang	60 orang	53 orang	88,34%	52 Orang	52 Orang	118,19 %
05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan alaporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
05	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan	18 Laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
				Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan koordianasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD								
<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.1</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	12 dokumen	-	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	200%
05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	24 laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan n	2 Laporan n	100%
<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.1</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Laporan	48 Laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
05	01	2.1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 unit	40 Unit	14 Unit	35%	12 unit	12 unit	100%
05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 Unit	40 Unit	18 Unit	100%	15 unit	15 unit	100%
05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	18 unit	12 Unit	12 Unit	100%	18 unit	18 unit	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
05	02			<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>									
05	02	2		<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									
05	02	2.01	01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 dokumen	2 dokumen	100%



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
0	0	2.0	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44 dokumen	44 Dokume	24 Dokumen	24 Dokumen	50%	12 Dokumen	12 Dokumen	27.27%
0	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	119 orang	119 Orang	210 Orang	210 Orang	100%	60 Orang	60 Orang	50.42%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	218 kasus	218 kasus	218 kasus	218 kasus	100%	218 Laporan	218 Laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	752 kasus	752 Kasus	12 Laporan	12 Laporan	100%	752 Laporan	752 Laporan	100%
05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
05	02	2		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>									
05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	2 Laporan	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
0	0	2.0	0	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30 laporan	30 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	40%
0	0	2.0	0	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 laporan	6 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	200%
0	0	2		<b>Pembinaan Penyidik Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>									
0	0	2.0	0	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
0	5	0	4	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>									
0	5	0	4	<b>Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
0	5	0	4	2.0 1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	24 dokumen	24 Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	50%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindunga Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 unit	0 Unit	1 unit	1 unit	100%	45 unit	1 unit	25%
05	04	2.04		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>									
05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	252 orang	280 Orang	350 Orang	50 Orang	14.28%	50 Orang	50 Orang	19.84%
05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	2 dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	160 Dokumen	0 Dokumen	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
				Sarana dan Prasarana									
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>									
5	4	5		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	5 Laporan	1 Laporan	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Tahun 2025 yang disusun pada tahun berjalan 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang periode 2021 – 2026. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi permasalahan.

Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berdasarkan Indikator Kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**  
**Sasaran Strategi**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	94.61%	69.90%	73.89%
Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3 %	24.32%	810.66%
Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	90.01%	112.5%



Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang telah dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, disajikan dalam tabel berikut ini:

**TABEL 2.3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA MAGELANG**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		IKK	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	5.89 menit	9.47 menit	15 menit	15 menit	
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	(SPM) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(SPM) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP Kota Magelang menghadapi berbagai tantangan dan kendala . Tantangan dan kendala tersebut antara lain semakin tingginya angka pelanggaran Perda sebagai konsekuensi Magelang sebagai kota jasa seiring dengan semakin besarnya pertumbuhan ekonomi di kota Magelang.

### **➤ Permasalahan Yang Hadapi:**

#### **1. Belum Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Masyarakat**

##### **a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum**

- Rendahnya kesadaran serta partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- Rendahnya pemahaman masyarakat akan aturan yang ada terkait ketentraman dan ketertiban umum;
- Kurangnya jumlah PPNS di Kota Magelang khususnya di Satpol PP Kota Magelang;
- Kurangnya sosialisasi mengenai Pelanggaran Perda kepada kelompok sasaran layanan pelanggaran Perda
- Kurangnya kapasitas / kualitas SDM Satpol PP dan Satlinmas;

#### **2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kebakaran**

##### **a. Pencegahan, penanggulangan dan penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran masih belum optimal**

- Keterbatasan jumlah serta pengembangan kapasitas/kualitas anggota pemadam kebakaran
- Kurangnya sarana dan prasarana penanganan yang memadai dan sesuai standart
- Rendahnya kesadaran serta pengetahuan Masyarakat dalam rangka pencegahan, penanggulangan serta penanganan kebakaran dan non kebakaran

### **➤ Isu Strategis**

1. Jumlah anggota Satpol PP yang berkurang setiap tahunnya;

2. Kurangnya kualitas dan kapasitas anggota Satpol PP, Damkar dan Satlinmas;
3. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih sering terjadi;
4. Pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat;
5. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketenteraman;

Dalam hal ini sesuai dengan isu strategis diatas dampak yang di timbulkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya rasa aman yang dirasa oleh Masyarakat Kota Magelang
2. Banyak terjadi pelanggaran Produk hukum Daerah
3. Kurang optimalnya proses peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat
4. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran baik dari Sumber Daya Manusia maupun dari sarana prasarana penanganan penanggulangan kebakaran.

Tantangan dan Peluang Satpol PP dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah diantara lain :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas anggota Satpol PP baik PNS maupun PPPK dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda.
2. Melaksanakan deteksi dini pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota
3. Memberdayakan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat ( SATLINMAS )
5. Mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

RKPD adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD

seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Dalam rancangan awal RKPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang bertanggung jawab melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang merupakan pendukung program prioritas dalam RKPD 2024.

Dalam rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan yang sangat jelas pada indikator kegiatan , hal ini disebabkan karena pada masa transisi berakhirnya RPJMD 2016-2021 maka disusun RPJMD 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 sehingga penetapan indikator kinerja terus di sesuaikan dan di diskusikan Bersama Bapeda, review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4											
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025											
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>12.468.649.271</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>12.628.480.972</b>	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku (persen)	<b>100 %</b>	<b>8.161.926.705</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku (persen)	<b>100 %</b>	<b>8.039.472.033</b>	

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	<b>Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja (Persen)</b>	100 %	50,109,800	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	<b>Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja (Persen)</b>	100 %	44,332,400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.631.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.521.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.480.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.129.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.630.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.093.100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2.351.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2.050.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.564.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.323.200	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	13.605.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	9.559.100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	<b>Tertib laporan kinerja dan keuangan (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>6.983.727.087</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	<b>Tertib laporan kinerja dan keuangan (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>7.180.880.028</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.972.420.487	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	7.239.870.376	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.674.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.006.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	8.632.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	6.864.800	

			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	<b>Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)</b>	100 %	153.358.680	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	<b>Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)</b>	100 %	134.551.680	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	125 Paket	6.581.880	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.581.880	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Paket	7.074.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.070.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	81.125.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59,743,200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6,978,300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.464.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan	24 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan	24 Dokumen	2.880,000	

	Penyediaan Bahan/Material	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.684.100	Penyediaan Bahan/Material	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.684.100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.014.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.527.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)</b>	<b>Terpenuhinya jasa untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>153.741.280</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)</b>	<b>Terpenuhinya jasa untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>144.260.499</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.647.700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.984.900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.724.404	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.724.404	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	71.369.176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	78.511.756	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>376.835.7 58</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>558.181.9 98</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	169.753.0 65	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	140.646.3 58	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	169.270.0 24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	305.722.4 90	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	31.805.65 4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	28.305.65 4	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.007.015	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELA NG)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6,007,015	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Prosentase penurunan penyakit masyarakat	<b>3 %</b>	<b>3.436.567 .086</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Prosentase penurunan penyakit masyarakat	<b>3 %</b>	<b>3.646.245 .780</b>	

	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tertanganinya Kasus Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	<b>2.899.173.426</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tertanganinya Kasus Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	<b>2,726,311,542</b>	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	730 Kasus	1.700.004.176	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	730 Laporan	1.967.799.120	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	365 Kasus	445.737.800	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	293.289.500	

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.058.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.383.100	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Dokumen	729.828.450	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Dokumen	703.950.200	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	210 Orang	7.409.400	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	210 Orang	4.428.500	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1.853.800	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	91.220.400	

	Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1.281.800	Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	950.000	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>		<b>Presentase Penegakan Perda</b>	<b>75 %</b>	<b>530.307.960</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>		<b>Presentase Penegakan Perda</b>	<b>75 %</b>	<b>379.705.360</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	200.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	2 Laporan	0	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	317.007.160	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	359.180.160	

	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	13.300.800	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	216.617.200	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)			7.085.700	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)			1.427.600	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	6 Laporan	7.085.700	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	6 Laporan	1.427.600	
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)			<b>870.155.480</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)			<b>942.763.159</b>	



	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)		100 %	<b>903.768,940</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)		100 %	<b>660.910.973</b>	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	46 Dokumen	781.638.930	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	46 Dokumen	854.564.059	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	3.770.700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	3.800.900	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)		100%	<b>80.141.850</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadaman Kebakaran, KOTA MAGELANG)	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</b>	100%	<b>79.640.500</b>	

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	280 Orang	10.518.450	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	350 Orang	9.398.700	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	10 Dokumen	69.623.400	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	10 Dokumen	68.861.500	
	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>				<b>8.374.700</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>				<b>6.138.000</b>	
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	8.374.700	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	6.138.000	
	<b>J U M L A H</b>				<b>12.468.649.271</b>	<b>J U M L A H</b>				<b>12.628.480.972</b>	

2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dicantumkan dalam Perubahan Renja OPD adalah mengakomodir hasil Musrenbang dan rencana kegiatan masyarakat ( RKM ). Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dimaknai dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat pada setiap level Musrenbang. Namun demikian tidak semua hasil musrenbang dapat diakomodir, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maupun tingkat kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahun 2025 untuk perencanaan perubahan Tahun 2025 ada beberapa yang sudah masuk dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, dan Rencana Kegiatan Masyarakat ( RKM ) sudah diakomodir oleh Satuan Polisi Pamong Praja namun tetap di sesuaikan dengan kemampuan anggaran Daerah. Disamping itu aspirasi dari masyarakat tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga telah tercantum dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Berikut usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kota Magelang**

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volum e	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>				
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>				

	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	3 Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	35 Tabung dan 125 Pengisian tabung pemadam kebakaran	Tabung Apar (RKM) dan Refil
--	--	-------------	---	--	-----------------------------

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersebut dalam Pasal 65 ayat ( 1 ) huruf b “Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat” sehingga dalam hal ini Kepala Daerah memerlukan perangkat kerja yang dapat mendukung serta melaksanakan amanat Pasal 65 tersebut diatas.

Sebagai tindak lanjut tugas tersebut diatas, maka Kepala Daerah melalui pasal 225 ayat ( 1 ) “ Dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti melalui Peraturan Daerah masing – masing yang fungsinya sama, yakni memposisikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegakan Perda di Daerah.

Melalui Penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Keberadaan dan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja ( Renja ) Satpol PP Kota Magelang telah mendukung terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi. Program – Program tersebut antara lain Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

**Tabel 3. 1**  
**Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang**

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan penegakan Perda
		Meningkatkan penegakan produk hukum Daerah	Peningkatan kapasitas SDM Trantibumlinmas
		Meningkatkan kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas	Peningkatan peran serta masyarakat
		Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman	

**3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah: “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”. Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kota Magelang. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia.

Tersirat dalam persandingan visi tersebut bahwa mewujudkan Magelang sebagai kota yang maju merupakan salah satu kondisi menuju kemandirian daerah, yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Tengah terkait kemandirian daerah. Kesehatan dan kebahagiaan masyarakat merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini selaras dan mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk lebih membuat sejahtera masyarakatnya. Sedangkan dalam persandingan dengan kebijakan tingkat nasional,

menjadikan Magelang sebagai kota yang maju selaras dengan mewujudkan Indonesia maju. Masyarakat Kota Magelang yang lebih sehat dan bahagia menjadi modal yang kuat dalam mengembangkan kepribadian diri berlandaskan nilai-nilai etika dan budaya lokal. Semangat untuk saling membantu dalam lingkungan yang toleran akan menumbuhkan jiwa gotong royong, dan kondisi tersebut mencerminkan dukungan terhadap kebijakan nasional.

Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang 2005- 2025, Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari Tema Tahap Ke-4 RPJPD, yaitu tahun 2020-2025. Tema yang diamanatkan adalah:

- Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh di Berbagai Bidang;
- Mewujudkan Tercapainya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi, Berlandaskan Budaya Yang Unggul, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Mandiri, serta;
- Mewujudkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Masyarakat Madani.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Dari rumusan visi: “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia” yang menyiratkan adanya 2 (dua) dimensi yang akan diwujudkan, yaitu dimensi membangun wilayah kota dan membangun masyarakatnya, maka untuk mewujudkan Magelang sebagai kota yang maju ditempuh melalui misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif, serta misi ke-5 yaitu Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur. Sedangkan untuk mewujudkan Magelang sebagai kota sehat, dilaksanakan melalui misi ke-2, yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi ke-2 tersebut juga sebagai upaya untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih sehat. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Magelang menjadi lebih bahagia ditempuh melalui pelaksanaan misi ke-1, yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq, misi ke-2 yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan misi ke-4, yaitu

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Sebagai tindak lanjut misi adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, sedangkan sasaran adalah rumusan mengenai keadaan yang menggambarkan tercapainya tujuan. Uraian penjabaran misi ke tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- Misi ke-1: Mewujudkan Masyarakat yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq. Misi ini memiliki tujuan Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya, sedangkan sebagai sasaran adalah 1) Meningkatnya penguatan toleransi, 2) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, 3) Meningkatnya stabilitas daerah, 4) Meningkatnya penguatan kebudayaan, dan 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan .
- Misi ke-2: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi kedua ini mempunyai tujuan yaitu Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Sasaran dari tujuan ini antara lain 1) Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing, 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dan 3) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan.
- Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Tujuan misi ketiga ini adalah: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, 2) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, profesionalitas, dan akuntabilitas manajemen pemerintahan, dan 3) Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur.
- Misi ke-4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Misi ke 4 mempunyai 2 tujuan. Tujuan pertama yaitu: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Inklusif, dengan sasaran adalah: Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan sektor ekonomi riil yang berkualitas, merata dan berkeadilan. Tujuan kedua yaitu: Meningkatnya daya saing Magelang sebagai pusat pelayanan jasa dengan sasaran Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, kesehatan, Pendidikan dan pariwisata.



- Misi ke-5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur. Misi ke 5 mempunyai 2 tujuan, yaitu Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan, dengan sasarannya adalah: 1) Meningkatnya cakupan infrastruktur dengan kondisi baik, 2) Meningkatnya cakupan penyelenggaraan penataan ruang yang akuntabel, 3) Meningkatnya aksesibilitas sarana perkotaan, 4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan 5) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan yang kedua adalah: Meningkatnya ketahanan daerah. Sebagai sasaran adalah: 1) Meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan 2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Adapun Tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah **“Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum”**

Dan dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatMenurunnya Jumlah Korban Akibat Bencana.
2. Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran.

Dalam menetapkan tujuan sasaran tidak lepas dari visi dan misi Walikota Wakil Walikota terpilih tahun 2020.

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan awal RPJMD urusan wajib Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja ada pada misi ke 1 “Mewujudkan Masyarakat yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq

“ dan Misi ke 5 “Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada Tahun 2025
1	Meningkatnya ketenteraman dan		Nilai Penguatan Ketenteraman	Jumlah Tingkat penyelesaian pelanggaran perda ditambah	84.20%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada Tahun 2025
	ketertiban umum		dan Ketertiban Umum	Persentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas ditambah Persentase siskamling aktif dibagi 3	
2		Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai sakip	Hasil perhitungan LKE	90.01
3		Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Jumlah gangguan trantibum tahun n-1 dikurangi jumlah gangguan tahun n dibagi jumlah gangguan trantibum tahun n-1 X 100%	3%
4		Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah " Pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non kebakaran di bagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran x 100%	100%

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan Kegiatan .

Dalam merumuskan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sangat-sangat memperhatikan faktor-faktor antara lain :

- 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam dalam menetapkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari visi dan misi Walikota Wakil Walikota terpilih tahun 2020. Demikian juga dalam menetapkan program dan kegiatan, adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Wakil Walikota terpilih tahun 2020.

### 3). Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang ditetapkan Pemerintah untuk bisa di capai Pemerintah Daerah khususnya pada Pelayanan Dasar salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, maka Satpol PP Kota Magelang melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

### 4). Berbasis Gender

Disamping itu, program/kegiatan perencanaan berbasis gender berdampak langsung bagi masyarakat yang ada di Satpol PP Kota Magelang adalah :

1. Sub Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
2. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

#### b. Uraian Garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan ,

Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 antara lain :

#### 1. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*, dengan kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. *Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, dengan kegiatan yaitu :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan :
- Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan yaitu :
- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan :
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Sub Kegiatan :
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
- c. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan legal

Sesuai dengan Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, maka Satpol PP

Kota Magelang melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**KOTA MAGELANG**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.628.480.972			11.055.464.830		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		100 %	8.039.472.033			1,00 %	8.805.429.294	
1	05	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja		100 %	44.332.400			100 %	24.862.750	
1	05	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.521.600	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja



1	05	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	2 Dokumen	2.129.900	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum			2.728.660	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	2 Dokumen	2.093.100	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum	,		3.289.660	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	1 Dokumen	2.050.500	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum			2.255.550	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	2 Dokumen	2.323.200	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum			3.085.720	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	24 Laporan	9.559.100	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			15.758.710	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Tertiba Laporan kinerja dan keuangan		100 %	<b>7.180.880.028</b>			100 %	<b>7.691.625.920</b>	
1	05	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	60 Orang/Bulan	7.239.870.376	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			7.678.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	2.006.200	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			3.338.280	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD		18 Laporan	6.864.800	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum		18 Laporan	10.287.640	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran		100 %	<b>134.551.680</b>			100 %	<b>238.292.450</b>	
1	05	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 paket	6.581.880	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			13.303.400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 paket	7.070.200	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			7.863.350	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 paket	59.743.200	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			109.007.800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Paket	4.464.300	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			7.676.570	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	01	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	24 Dokumen	2.880.000	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum			3.168.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Paket	5.684.100	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum			11.020.350	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	7.200.000	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum			10.560.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	24.527.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			75.692.980	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia		100 %	0			100 %	46.241.580	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	0 Unit	0	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum	0 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	2 Unit	0	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum		8.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	2 Unit	0	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum		37.441.580	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 7	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamata Semua Keluraha n	1 Unit	0	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya jasa untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran		100 %	<b>144.260.499</b>		100 %	<b>177.003.041</b>	

1	05	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 laporan	7.984.900	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			11.741.510	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	71.724.404	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			78.898.600	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	24 laporan	78.511.756	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			86.362.931	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	<b>558.181.998</b>				<b>627.403.553</b>	
1	05	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	40 Unit	140.646.358	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			219.210.785	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		40 unit	305.722.490	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			336.298.479	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Unit	28.305.654	Dana Transfer Umum– n,Dana Alokasi Umum			28.305.645	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Unit	6.007.015	Dana Transfer Umum– n,Dana Alokasi Umum			43.588.644	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3		100 %	<b>3.646.245.780</b>			100 %	<b>2.164.579.120</b>	
1	05	02	2.0 1		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tertanganinya Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	<b>2.726.311.542</b>			100 %	<b>2.164.579.120</b>	

1	05	02	2.0 1	000 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.383.100					0	
1	05	02	2.0 1	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	24 Dokume	703.950.200	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum				0	Satuan Polisi Pamong Praja



1	05	02	2.0 1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	210 Orang	4.428.500	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.0 1	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan		12 Dokumen	91.220.400	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	02	2.0 1	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	730 Laporan	1.967.799.120	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			2.164.579.120	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.0 1	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laoran Laporan	293.289.500	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	02	2.0 1	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	950.000	Dana Transfer Umum – n, Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.0 2		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Presentase Penegakan Perda		75 %	<b>379.705.360</b>			75 %	<b>0</b>	
1	05	02	2.0 2	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	216.617.200	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi n, Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.0 2	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	359.180.160	Dana Transfer Umum – n, Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja

1	05	02	2.0 3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				1.427.600	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum				0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.0 3	000 6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		6 Laporan	1.427.600	Dana Transfer Umum- n,Dana Alokasi Umum				0	Satuan Polisi Pamong Praja
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>942.763.159</b>					<b>85.456.416</b>	
1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		100 % 15 menit	<b>942.763.159</b>					<b>85.456.416</b>	

1	05	04	2.0 1		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran		100 %	<b>660.910.973</b>			100 %	<b>85.456.416</b>	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	2.0 1	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	46 Dokumen	854.564.059	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			85.456.416	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	2.0 1	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Magelang Magelang Tengah, Gelangan	1 Unit	3.800.900	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	2.0 4		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100 %,	<b>79.640.500</b>			100 %	<b>0</b>	

1	05	04	2.0 4	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	350 Orang	9.398.700	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	2.0 4	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kota Magelang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	10 Dokumen	68.861.500	Dana Transfer Umum–n,Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	2.0 5		<b>Penyelenggara n Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>				<b>6.138.000</b>				<b>0</b>	
1	05	04	2.0 5	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		1 Laporan	6.138.000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			0	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>TOTAL</b>									<b>12.628.480.972</b>				<b>11.055.464.830</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang pada Tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pagu indikatif. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang pada Tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
1	05	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>											8.062.206.605
1	05	01	2		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											44.332.400
1	05	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	12.955.000	1 dokumen	4.665.400	2 dokumen	2.558.400	2 dokumen		2 Dokumen	20.178.800
1	05	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 dokumen	2.839.300			1 Dokumen	2.839.300
1	05	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen			1 dokumen	400.000	1 dokumen	2.390.100			1 Dokumen	2.790.100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
						Perubahan RKA-SKPD										
1	05	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							1 Dokumen	2.734.000	1 Dokumen	2.734.000
1	05	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	450.000	1 Dokumen	2.594.800			1 Dokumen	3.044.800
1	05	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.050.000	1 laporan	4.346.000	1 laporan	2.993.200	1 laporan	1.356.200	4 Laporan	12.745.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	05	01	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>7.180.880.028</b>
1	05	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	2.377.832.264	52 Orang/Bulan	2.594.897.963	52 Orang/Bulan	1.548.165.246	52 Orang/Bulan	648.696.655	52 Orang/Bulan	7.169.574.128
1	05	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	2.674.300							5 Laporan	2.674.300
1	05	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	3.945.000	5 laporan	2.682.500	4 laporan	1.838.100	5 laporan	166.000	18 Laporan	8.631.600
1	05	01	2		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>134.551.680</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	0	0	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.500.000	1 paket	2.081.880	1 paket	2.000.000			1 paket	6.581.880
1	0	0	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.555.400	1 paket	1.000.000	1 paket	2.514.800			1 paket	7.070.200
1	0	0	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	16.243.200	3 paket	14.500.000	3 paket	14.500.000	3 paket	14.500.00 0	3 paket	59.743.200
1	0	0	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3.000.000	3 paket	1.500.000	3 paket	1.500.000	3 paket	978.300	3 paket	6.978.300
1	0	0	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	6 dokum en	1.440.000			6 dokume n	1.440.000			12 dokume n	2.880.000
1	0	0	2	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	2.500.000	1 paket	3.184.100					2 Paket	5.684.100
1	0	0	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	6.400.000	12 laporan	3.200.000					24 Laporan	9.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	05	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	19.934.000	2 laporan	10.000.000	2 Laporan	3.080.000	2 laporan	3.000.000	2 Laporan	36.014.000
1	05	01	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>144.260.499</b>
1	05	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	5.647.700	4 laporan	3.000.000	4 laporan	2.000.000			12 Laporan	10.647.700
1	05	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	24.500.000	12 laporan	23.500.000	12 laporan	18.803.300	12 laporan	4.921.104	48 Laporan	71.724.404
1	05	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	22.052.690	6 laporan	21.467.964	6 laporan	19.292.741	6 laporan	75.000	24 laporan	61.888.395
1	05	01	2		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>558.181.998</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	47.500.000	12 unit	56.933.000	12 unit	54.000.000	12 unit	30.775.865	12 unit	189.208.865
1	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	97.000.000	15 unit	107.000.000	15 unit	102.000.000	15 unit	28.660.464	15 unit	334.660.464
1	0	0	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	9.778.000	18 unit	8.472.800	18 unit	10.054.854			18 unit	28.305.654
1	0	0	2	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	6.007.015					2 unit	6.007.015
1.05.02					<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>											<b>3.107.920.702</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>2.726.311.542</b>
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokum en	13.058.000							2 Dokumen	13.058.000
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 dokum en	201.087.800	3 dokume n	176.800.00 0	3 dokume n	180.240.00 0	3 dokum en	153.150.0 00	12 Dokumen	711.277.800
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	2.100.000	60 Orang	3.266.900					60 Orang	5.366.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
	yang Bernuansa Hak Asasi Manusia											
1.05.02.2.01.0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangananan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Samana antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokum en	39.405.200					6 Dokum en	61.475.00 0	12 Dokume n	100.880.20 0
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	56 Lapora n	501.869.892	56 Laporan	518.997.19 2	56 Laporan	496.902.35 8	50 Lapora n	220.400.00 0	218 Laporan	1.539.809.44 2
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	188 Lapora n	91.927.400	188 Laporan	105.000.00 0	188 Laporan	92.710.000	188 Lapora n	65.000.000	752 Laporan	354.637.40 0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1.05.02.2.01.0017					Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1.281.800							188 Laporan	1.281.800
1	05	02	2		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>											<b>379.705.360</b>
1	05	02	2	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	79.236.790	3 laporan	116.184.790	3 laporan	122.261.790	3 laporan	41.496.790	12 laporan	359.180.160



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	05	02	2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	3 laporan	7.797.200	3 laporan	8.894.000	3 laporan	3.684.000	3 laporan	150.000	12 lapora	20.525.200
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota											1.903.800
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Lapora n	980.000	1 Laporan	923.800					2 Laporan	1.903.800
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
					<b>UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
1	0	0			<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>											<b>755.267.673</b>
1	0	0	2		<b>Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran										<b>660.910.973</b>
1	0	0	2	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evak uasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokum en	220.193.92 0	3 Dokume n	220.172.92 0	3 Dokume n	207.895.23 3	3 Dokum en	8.850.000	12 Dokume n	657.110.07 3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	05	04	2	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					45 unit	3.800.900			45 unit	3.800.900
1	05	04	2		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>											79.640.500
1	05	04	2	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			50 orang	10.017.100						10.017.100
1	05	04	2	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar			160 Dokumen	69.623.400					160 dokumen	69.623.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 Perubnahan (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	0	0	2		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>											14.716.200
1	0	0	2	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelam atan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelama tan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Lapora n	696.200	2 Laporan	7.010.000	2 Laporan	7.010.000			5 Laporan	14.716.200

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025, dengan usulan pagu setiap kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam Renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang muncul dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya, yang akan dilaksanakan ditahun berjalan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Mengingat dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKAP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2024 disusun dengan mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang dan forum OPD yang selaras dengan program prioritas dalam RKPDP Tahun 2025.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan.
3. Sekretaris dan Bidang yang berada dalam lingkup perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berkewajiban menjamin konsistensi

penyusunan RKAP Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Dengan situasi yang aman, tertib dan teratur, diharapkan pembangunan di Kota Magelang dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas Pendidikan, serta perubahan sosial dan budaya masyarakat. Kehidupan masyarakat lebih **Maju, Sehat dan Bahagia**.

Demikian Perubahan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2025 untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

Magelang 28 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA  
KOTA MAGELANG



**OT ROSTRIANTO. S. IP., M.M**

Pembina TK.I  
19690523 199003 1 003